

Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi di Indonesia

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1-16

© The Author(s) 2023



Volume 20.1 Januari-Juni 2023

Publikasi online: 24 Agustus 2023

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

DOI: 10.36451/jisip.v20i1.10

Fajar Imam Zarkasyi¹  **dan Irmawan Effendi²** 

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Irmawan Effendi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Jakarta, 12610, Indonesia.

E-mail: irmawan@iisip.ac.id

Abstrak

Sejak visi 2030 dideklarasikan, Arab Saudi berupaya keras membentuk citra sebagai negara modern khususnya di tengah negara barat. Akan tetapi, citra baru yang sedang dibangun Arab Saudi tersebut berpotensi merusak *soft power*nya yang telah terbangun di tengah dunia Islam. Moderasi Islam yang dipromosikan Arab Saudi dianggap sebagai upaya dalam menyeimbangkan antara citra modern yang sedang dibangun dengan citra keislaman yang ingin dipertahankan. Citra sebagai negara konservatif dan lekat dengan paham Salafisme menjadi kontradiktif dengan narasi moderasi Islam yang ditawarkan. Artikel jurnal ini bertujuan menjelaskan bagaimana moderasi Islam sebagai sebuah bentuk diplomasi publik Arab Saudi diimplementasikan di Indonesia. Melalui konsep diplomasi publik, terlihat bahwa pola Arab Saudi dalam mempromosikan narasi moderasi Islam di Indonesia menekankan upaya membangun dialog publik secara langsung. Hal itu dilakukan dengan aktif menginisiasi beberapa konferensi yang disponsori Arab Saudi dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi Islam yang melibatkan cendekiawan, politisi, serta alumni di Indonesia.

Kata Kunci

Islam, Moderasi, *Soft power*

Abstract

Since the 2030 vision was declared, Saudi Arabia has worked hard to form an image as a modern country, especially in the midst of western countries. However, the new image that is being built by Saudi Arabia has the potency to damage the soft power that has been built in the Islamic world. The Moderation of Islam promoted by Saudi Arabia is seen as an effort to balance between the modern image that is being built and the Islamic image that it wants to maintain. The image of being the conservative country and closely following Salafism are contradictory to the narrative of Islamic moderation it offers. This journal article aims to explain how the Islamic moderation as a form of Saudi Arabia's public diplomacy is implemented in Indonesia. Through the concept of the public diplomacy, it can be seen that Saudi Arabia's pattern in promoting the narrative of Islamic moderation in Indonesia emphasizes efforts to build the direct public dialogue. This was done by actively initiating several conferences sponsored by Saudi Arabia in conveying messages of Islamic moderation involving the scholars, politicians, and alumni in Indonesia.

Keywords

Islam, Moderation, *Soft power*

Pendahuluan

Pada kurun waktu 2020 hingga saat ini, Arab Saudi aktif melakukan beberapa aktivitas dalam mempromosikan moderasi Islam di Indonesia. Tercatat, terdapat beberapa lawatan yang dilakukan oleh beberapa pejabat politik Arab Saudi di Indonesia dalam rangka menyampaikan komitmen negara tersebut dalam mendukung pemahaman Islam yang moderat. Pada bulan Maret 2022 misalnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluh Kerajaan Arab Saudi Arabia, H.E. Dr. Abdullatif bin Abdulazis Al-Syaikh di kantor wakil kepresidenan. Pada lawatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan dukungannya terhadap posisi politik Arab Saudi dalam mempolopori gerakan Islam *Wasathiyah* di kancah global. Keseriusan Arab Saudi dalam menargetkan Indonesia dalam kampanye moderasi Islam-nya juga dapat dilihat dari keterlibatan aktif Arab Saudi dalam menginisiasi beberapa pertemuan penting yang melibatkan cendekiawan, tokoh negara, dan alumni kampus Arab Saudi dalam membahas narasi moderasi Islam (Ramadhan, 2022).

Sikap Arab Saudi dalam mempromosikan moderasi Islam di Indonesia maupun dalam kancah global ini tidak terlepas dari terjadinya perubahan peta ekonomi di negara tersebut. Sejak satu dekade terakhir, pemerintah Arab Saudi mulai mengantisipasi terhadap ancaman ekonomi yang berpotensi melanda negaranya dengan habisnya cadangan minyak yang dimiliki oleh negara tersebut di tahun 2030. Kondisi tersebut mendorong Arab Saudi untuk melakukan diversifikasi ekonominya yang dituangkan dalam sebuah visi nasional yang diumumkan pada tahun 2030 oleh Muhammad Bin Salman sebagai pemimpin *de facto*. Komponen penting dari visi Arab Saudi ini adalah untuk menarik modal asing di sektor nonmigas serta menargetkan 100 juta wisatawan per tahun pada tahun 2030 (*Vision 2030*, n.d.).

Akan tetapi, visi 2030 yang bertujuan menyelamatkan perekonomian Arab Saudi tidak terlepas dari beberapa isu utama. Salah satunya adalah terkait dengan narasi keterbukaan yang didorong oleh Arab Saudi dalam rangka mendorong masuknya modal dan investasi ke negara tersebut. Hal ini tentunya bukan tanpa konsekuensi penting. Dalam konteks politik domestik, perubahan sikap keagamaan tersebut tentunya memicu resistensi dari beberapa kalangan masyarakat Arab Saudi khususnya yang muncul dari golongan ulama dan cendekiawan yang teguh mempertahankan prinsipnya.

Sejak berdirinya, Arab Saudi telah menjadikan paham Islam konservatif atau yang dikenal dengan Salafisme sebagai ideologi negara. Perkawinan politik dan agama ini telah menjadi fundamental penting bagi keberlangsungan politik Arab Saudi. Pemahaman Salafisme ini menjadi basis legitimasi politik bagi para raja Arab Saudi dalam menjalankan pemerintahan. Pergeseran ini tentunya menimbulkan gejolak resistensi yang berujung pada ditangkapnya beberapa ulama senior yang dianggap menentang politik keterbukaan yang dimainkan oleh Arab Saudi.

Dalam konteks politik luar negeri, hal ini juga mengandung beberapa persoalan mendasar. Sejak berdirinya kerajaan ini, status sebagai pelayan dua kota suci telah menjadi sumber penting bagi *soft power* Arab Saudi di kancah global khususnya di dunia Islam. Tidak hanya sebagai pelayan dua kota suci, *soft power* Arab Saudi juga didasarkan oleh paham Islam konservatif yang dipromosikan oleh negara tersebut. Sejak munculnya *oil boom* di tahun 1970, Arab Saudi hampir menggelontorkan dana yang cukup besar dalam menyebarkan paham Islam konservatif ini yang berdampak pada berkembangnya dakwah salafi secara global termasuk di wilayah Asia.

Sebagai upaya membangun citra baru sebagai negara modern untuk mencapai visi 2030, narasi moderasi Islam adalah salah satu media penting yang digunakan oleh Arab Saudi dalam diplomasi publiknya. Bin Salman sebagai penguasa *de facto* Arab Saudi menegaskan bahwa Arab Saudi berkomitmen mendukung penuh moderasi Islam sebagai nilai politik Arab Saudi. Pada tahun 2017 misalnya, Bin Salman menegaskan akan membawa narasi moderasi Islam ke Arab Saudi. Dalam konteks tersebut, Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu target kampanye Arab Saudi dalam mempromosikan narasi moderasi Islam di kancah global.

Di tengah adanya *gap* persoalan tersebut, belum banyak literatur yang membahas lebih jauh terkait kampanye narasi moderasi Islam sebagai sebuah diplomasi publik Arab Saudi, khususnya dalam konteks mencapai visi 2030 ke dalam kajian akademik. Jika ditelaah, penelitian yang telah ada umumnya lebih banyak menyoroti performa diplomasi publik Arab Saudi dalam membangun citranya sebagai negara

modern terkait upaya mencapai visi 2030. Tal Samuel-Azran misalnya dalam artikelnya yang berjudul *Nation Branding in the Arab World* menyatakan *branding* Arab Saudi dalam rangka menarik investasi modal dan peningkatan kunjungan turis merupakan persiapan dalam menghadapi situasi ekonomi pasca habisnya minyak. Menurutnya, tingkat keberhasilan Arab Saudi dalam membangun *branding* sebagai modern belum seoptimal dibandingkan Qatar dan Uni Emirat Arab (Samuel-Azran, 2020).

Senada dengan argumen tersebut, Ibrahim Alsedrah dalam artikelnya yang berjudul *Branding the Kingdom of Arab Saudi Arabia* menyatakan bahwa tidak adanya lembaga khusus *branding* yang dimiliki Arab Saudi menjadi salah satu kekurangan negara tersebut di kancah global. Padahal, menurutnya *branding* menjadi komponen penting dalam politik luar negeri Arab Saudi saat ini dalam rangka meyakinkan publik global terhadap keberhasilan dan relevansi visi 2030 di tengah skeptisme yang muncul sekaligus memperluas citra Arab Saudi di luar citra tradisionalnya sebagai negara penjaga dua kota suci (Alsedrah, 2021).

Selain menyoroti performa *branding* yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam menopang keberhasilan visi 2030, tulisan lainnya juga membahas tantangan politik internal yang dihadapi Arab Saudi dalam membangun citra politik global. Dalam jurnalnya yang berjudul *Arab Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Arab Saudi Arabia*, Winarni dan Permana menyatakan bahwa upaya putra mahkota untuk mengubah identitas Arab Saudi dan membangun reputasi yang berbeda melalui Arab Saudi Vision 2030 menjadi sebuah kontradiksi dalam pemerintahan dan masyarakat Arab Saudi (Winarni & Permana, 2022).

Selain menjelaskan dinamika politik internal terkait Arab Saudi Vision 2030, jurnal tersebut juga menganalisis potensi buruk dari usaha *branding* Arab Saudi terhadap rusaknya citra identitas Arab Saudi sebagai negara Islam konservatif yang taat. Meskipun telah sedikit menyinggung tentang dampak *branding* baru yang dibangun Arab Saudi terhadap terganggunya identitas islaman yang telah terbangun, penelitian ini tidak secara khusus membahas langkah yang diambil Arab Saudi untuk merespon potensi negatif yang timbul tersebut. Terlebih, menyinggung moderasi Islam sebagai sebuah strategi diplomasi publik yang digunakan Arab Saudi.

Adapun penelitian yang menyinggung aspek moderasi Islam dalam politik luar negeri Arab Saudi dikemukakan oleh Stella Athanasoulia dalam artikelnya yang berjudul *From 'Soft' to 'Hard' to 'Moderate': Islam in the Dilemmas of Post-2011 Arab Saudi Foreign Policy*. Artikel tersebut menyoroti pergeseran perilaku kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam merespons perubahan geopolitik akibat kemunculan *arab spring* di Timur Tengah dan bagaimana narasi dan identitas keIslaman digunakan oleh Arab Saudi secara intens dalam mencapai kepentingan politiknya (Athanasoulia, 2020).

Konsekuensinya, sebagai sebuah alat politik, narasi keislaman yang dibangun Arab Saudi bersifat dinamis karena mengikuti perubahan kepentingan politik Arab Saudi. Terbukti, terjadi beberapa kali terjadi pergeseran narasi keislaman yang dibangun oleh Arab Saudi mulai dari *soft*, *hard*, hingga akhirnya menuju *moderate* pasca 2011. Perubahan menuju narasi moderasi Islam menurutnya didorong oleh adanya kepentingan Arab Saudi untuk mengamankan citranya di dunia Barat dalam rangka mendorong masuknya investasi. Dalam menjelaskan citra moderasi Islam yang diupayakan Arab Saudi, jurnal

tersebut juga menyinggung korelasinya dengan kemungkinan perubahan ideologi salafi yang selama ini dianut Arab Saudi.

Meskipun telah menyinggung kepentingan geopolitik dan ekonomi sebagai faktor utama dalam membentuk perilaku Arab Saudi dalam mencitrakan dirinya sebagai negara Islam yang moderat, jurnal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana narasi tersebut dikampanyekan dalam praktiknya. Lebih lanjut, faktor apa yang secara lebih khusus mendorong Arab Saudi menjadikan sebuah negara sebagai target dari kampanye moderasi Islam tersebut. Faktor ekonomi dan geopolitik tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengapa Arab Saudi memilih suatu negara menjadi target kampanye narasi moderasi Islam yang dijalankan. Terlebih, faktor ekonomi dan geopolitik yang disinggung oleh jurnal tersebut erat kaitannya dengan konteks negara-negara barat sebagai target diplomasi publik Arab Saudi dalam rangka meningkatkan investasi dan kunjungan turis.

Berdasarkan pemaparan tersebut, legitimasi persoalan yang ditawarkan oleh tulisan ini setidaknya dibangun di atas dua *gap* utama. Pertama, adanya *gap* persoalan mengenai kuatnya paradoks dalam langkah Arab Saudi untuk mengkampanyekan moderasi Islam di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Arab Saudi terkait tingginya potensi skeptisme terhadap wacana yang dikampanyekan serta melemahnya dukungan dari kelompok yang menjadi tonggak *soft power* Arab Saudi di Indonesia, membuat langkah Arab Saudi dalam mengkampanyekan moderasi Islam menarik untuk dibahas. Kedua, adanya *gap* literatur terkait minimnya kajian yang membahas tentang bagaimana moderasi Islam tersebut berjalan dalam praktiknya. Pertanyaan tentang mengapa Arab Saudi memilih suatu negara menjadi target atau bagaimana kampanye tersebut dijalankan menjadi penting untuk dijawab.

Mengacu pada *gap* yang dipaparkan, tulisan ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Bagaimana strategi Arab Saudi dalam meningkatkan soft power-nya melalui promosi narasi moderasi Islam di Indonesia.* Atas dasar pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana strategi diplomasi publik Arab Saudi melalui promosi moderasi Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana strategi tersebut mampu meningkatkan *soft power* nya di tengah tantangan yang dihadapi dalam mengkampanyekan narasi tersebut di Indonesia.

Jawaban terhadap penelitian ini didasarkan pada beberapa acuan konseptual seperti *soft power* dan diplomasi publik. Kedua konsep tersebut acapkali dianggap sama, padahal memiliki perbedaan. *Soft power* bersifat statis karena merupakan persepsi yang tertanam dalam opini seseorang. Berbeda dengan hal itu, diplomasi publik bersifat dinamis karena merupakan upaya dan langkah yang sejatinya berubah sesuai kebutuhan. *Soft power* dan diplomasi publik tetaplah harus dibedakan antara satu sama lain. Adakalanya sebuah negara memiliki *soft power* tapi tidak memiliki strategi diplomasi publik. Sebaliknya, ada negara yang memiliki diplomasi publik tapi tidak memiliki *soft power*.

Soft power dilihat sebagai kemampuan untuk menggunakan pilihan-pilihan yang lebih erat dengan *intangible assets* seperti kepribadian yang menarik, kebudayaan, nilai-nilai politik dan institusi serta kebijakan-kebijakan yang dipandang sah atau memiliki otoritas moral (Nye, 2009). Hal ini tentu jauh berbeda dengan *hard power* yang memiliki dominasi penggunaan *tangible asset* seperti kemampuan militer dalam interaksi antar aktor dalam hubungan internasional.

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah negara memiliki keunggulan dan keberhasilan dari *soft power*. Pertama, negara tersebut memiliki banyak saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk mengangkat isu tertentu dan membentuknya di media global. Kedua, negara tersebut mengangkat ide dan budaya yang sama dengan norma global yang sedang berlaku dan terakhir kredibilitas negara tersebut ditingkatkan oleh perilaku domestik dan internasional (Snow & Cull, 2020). Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan strategi diplomasi publik.

Diplomasi publik akan berhasil jika dilakukan tidak didasari oleh penegasan nilai-nilai, tetapi keberhasilan akan dicapai jika adanya keterlibatan dialog. Pesan-pesan yang disampaikan juga harus lebih pintar dan halus. Pada dimensi aktor, keterlibatan dalam diplomasi publik tidak harus melalui saluran resmi pemerintah, tetapi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam negara yang dituju (Melissen, 2005) baik dengan cara tradisional maupun dengan digitalisasi di era *New Media* (Cull, 2019; Manor, 2013; Palit, 2023)

Terdapat tiga faktor yang saling terhubung untuk menganalisis diplomasi publik aktor internasional yaitu struktur dominan hegemoni dan kontra-hegemoni, gagasan yang berlaku dalam sistem internasional dan status kekuatan serta ambisi aktor tersebut (Alexander, 2021).

Berdasarkan acuan konseptual tersebut, kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa melalui promosi moderasi Islam di Indonesia, Arab Saudi memanfaatkan narasi tersebut untuk turut serta menyuarakan adaptasi sistem monarki yang dianutnya terhadap nilai-nilai keterbukaan dan humanisme. Selain itu, dengan menyuarakan moderasi Islam, Arab Saudi juga turut menyuarakan komitmen negara tersebut terhadap nilai-nilai global sehingga dapat diterima oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode teknik analisis teks. Teks yang dimaksud mencakup dokumen yang tertulis dan terucap baik yang diberitakan pada media pers khususnya media berita *online* ataupun yang disampaikan atau terucap dalam bentuk video internet. Data teks yang dianalisa mencakup pernyataan tokoh dan pejabat politik yang dinilai berperan aktif dalam menginformasikan narasi moderasi Islam yang dikampanyekan Arab Saudi dalam media-media yang telah disebutkan.

Adapun terkait teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik berbasis dokumen atau studi pustaka dalam mengumpulkan data-data primer yang berasal dokumen resmi kenegaraan dan berita-berita yang dikeluarkan oleh kantor berita nasional ataupun video yang ditampilkan secara resmi oleh kanal berita ataupun semacamnya di beberapa *platform* media sosial. Prosedur yang digunakan untuk *me-recording* dan *me-reducing* data sebagai komponen dalam analisis konten dilakukan dengan menyortir seluruh berita atau video yang memuat kata kunci moderasi Islam Saudi di Indonesia khususnya yang terkait dengan pernyataan alumni Saudi serta tokoh publik di Indonesia yang dimuat dalam platform media atau video *online* (Krippendorff, 2018). Data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisa berdasarkan pada konstruksi narasi yang ditawarkan oleh konsep diplomasi

publik dan analisis teks dengan atribut penelitian pernyataan kata ‘moderat’, ‘radikal’ dan ‘salafisme’ yang terdapat dalam teks pernyataan Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI) dan video Said Aqil Siroj (Mantan Ketua PBNU).

Hasil dan Pembahasan

Strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi, sebagaimana yang disampaikan oleh Snow & Cull yaitu dengan memanfaatkan saluran diplomasi lain, yaitu melalui jejaring alumni selain dari jalur formal yang selama ini berlangsung yaitu jalur diplomatik atau yang biasa disebut pendekatan *G to G* (*government to government*). Tidak hanya itu, Arab Saudi juga mengangkat nilai yang sama mengenai moderasi Islam. Tentunya ini adalah bagian untuk merubah persepsi salafisme yang berbeda dengan penganut aswaja di Indonesia, apalagi dengan label Wahabi yang selama ini ada dipersepsi publik Indonesia.

Pelibatan Alumni Universitas Arab Saudi sebagai *Brand Messenger*

Pada 10-12 Januari 2023, Universitas Islam Madinah (UIM) menyelenggarakan pertemuan Forum Alumni Universitas-Universitas Arab Saudi se-Asia Pasifik di Jakarta. Acara tersebut merupakan tujuan dari bentuk visi -misi UIM sebagai mercusuar Islam global. Ada empat fokus besar bahasan dalam forum tersebut: *pertama*, upaya alumni UIM di bidang penyebaran ilmu dan pengetahuan; *kedua*, UIM mengajak seluruh alumni menjelaskan konsep moderasi dalam Islam dan mendakwahkanannya, melawan ekstrimisme, dakwah toleransi Islam, dan orientasi Kerajaan Arab Saudi yang moderat; *ketiga*, peran alumni di bidang pengembangan hubungan negara mereka dengan Arab Saudi; dan *keempat* peran alumni dalam mengembangkan hubungan negara mereka dengan Kerajaan Arab Saudi (Atdikbud Riyadh, 2023).

Beberapa nama alumni UIM adalah nama-nama yang memiliki peran dalam masyarakat sipil. Salah satu tokohnya yaitu Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI), Salim Segaf Al-Jufri (Menteri Sosial), Hasan Abdullah Sahal (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor), Ahmad Cholil Lidwan (Ketua MUI Pusat), K.H. Bachtiar Nasir (Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Pada pertemuan tersebut, Hidayat menyebutkan bahwa banyak tokoh-tokoh nasional yang belajar di Arab Saudi seperti K.H Ahmad Dahlan, K.H Hasyim As'ary, K.H Wahab Hasbullah, K.H Mas Mansyur, K.H Agus Salim dan lainnya yang kemudian membangun organisasi besar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama dan memberikan warna yang sangat nyata bahwa Indonesia menjadi negara moderat.

Hydayat melanjutkan:

“Pada intinya adalah tidak mungkin mereka berada dalam posisi pimpinan lembaga kenegaraan, dan dipercaya rakyat dan negara di posisi terhormat seperti itu. Jika mereka menyebarkan Islam yang intoleran, tidak moderat, apalagi radikal, takfiri, dan tidak mencintai bangsa dan negaranya. Dari mana mereka belajar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin itu?, ya dari berbagai lembaga pendidikan/ perguruan tinggi di Arab Saudi.

Pembahasan seperti ini penting, kita bisa mendengar dan mengetahui ternyata, semuanya menuju arah yang sama bahwa alumni Arab Saudi di berbagai negara, menerapkan Islam yang moderat, Islam yang mencintai tanah airnya, Islam yang tidak mengkafir-kafirkan,” (Putri, n.d.).

Menurut Hidayat forum ini memiliki dua manfaat. Pertama, melalui forum ini umat akan semakin mengetahui bahwa Islam adalah sebuah arus besar yang menghadirkan moderatisme dan membantah segala bentuk ekstrimisme. Kedua, pelaksanaan ini membuktikan bahwa para alumnus Arab Saudi dari berbagai negara di dunia menyebarkan paham yang sama yaitu moderasi Islam yang lepas dari stigma terorisme dan radikalisme dan menghadirkan *rahmatan lil alamin* yang mencintai bangsa dan negaranya serta menjadi salah satu sumber perkembangan peradaban dunia (“Di Forum Alumni Universitas Arab Saudi Se ASEAN Dan Asia Pasifik, HNW: Islam Ajarkan Moderatisme, Cinta Negara, Bukan Radikalisme Atau Terorisme,” 2023).

Kalimat yang dilontarkan Hidayat adalah contoh dari pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi dari strategi diplomasi publik Arab Saudi. Kalimat yang disampaikan memiliki kecenderungan sebagai kontra-hegemoni yang sebelumnya narasi mengenai Islam yang dekat dengan terorisme dan radikalisme terbangun dengan kuat di negara-negara barat. Narasi ini penting untuk menguatkan identitas Islam sebagai bagian dari peradaban yang bukannya menakutkan belahan dunia lain bahkan hingga menimbulkan *Islamophobia*.

Arab Saudi dengan Visi 2030 ingin menempatkan dirinya sebagai bagian dari identitas moderat Islam yang selama ini sudah dijalankan Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, namun jumlah populasi masyarakat yang dominan muslim, menjadikan Islam sebagai salah satu dari faktor determinan dalam politik luar negeri Indonesia (Sukma, 2003). Tidak hanya itu, pasca munculnya kegiatan terorisme pemerintahan Indonesia juga giat memperlihatkan Islam moderat sebagai identitas politik luar negerinya salah satunya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Andriasanti, 2014)

Strategi diplomasi publik yang dilakukan melalui jejaring alumni ini merupakan bagian untuk menyebarluaskan moderasi Islam dan mengedepankan peran Arab Saudi dalam proses penanaman identitasnya. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, pemahaman mengenai Islam moderat masih sebatas sebagai pembeda dengan dengan radikalisme maupun ekstrimisme (Afwadzi & Miski, 2021). Padahal moderasi Islam memiliki pemahaman yang lebih luas yaitu sebagai *Wasatiyyah Islam* yang menekankan pada keadilan, keseimbangan dan toleransi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis (Helmy et al., 2021).

Dengan posisi publik yang sudah dicapai saat ini oleh para alumni UIM, sudah tentu akan memberikan pengaruh yang lebih luas lagi. Utamanya tidak hanya penyebaran moderasi Islam, tapi juga mengedepankan Arab Saudi sebagai negara yang memberikan dan menjadi aktor dalam ranah global.

Kampanye Moderasi Islam di Indonesia dalam Memperbaiki Citra Sistem Politik Arab Saudi

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem monarki absolut yang dijalankan Arab Saudi membawa persoalan tersendiri bagi citra dan legitimasinya di mata internasional khususnya terkait sorotan publik

global terhadap hak-hak sipil warga negaranya (Ghaziani & Ghaziani, 2022). Salah satu peristiwa penting yang menandai hal ini yaitu putusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Kanada pada tahun 2018. Hal yang menjadi sorotan Kanada yaitu ditangkapnya aktivis perempuan oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghina Islam dalam tulisan di blognya (Aulia, 2023). Baru kemudian, hubungan diplomatik tersebut dipulihkan pada tahun 2023.

Dalam menghadapi persoalan legitimasi dan citra tersebut, pada dasarnya Arab Saudi mengandalkan statusnya sebagai pelayan dua kota suci untuk membenarkan sistem monarki absolut yang dijalankannya. Selain itu, Arab Saudi juga menjadikan ajaran Salafisme sebagai sumber legitimasi terhadap sistem monarki tersebut. Ajaran Salafisme yang menekankan ketaatan mutlak terhadap *waliyul amer* menjadi sumber legitimasi politik bagi Arab Saudi untuk mempertahankan sistem monarki dan mematikan seluruh bentuk ekspresi politik yang mengarah pada gerakan demokrasi.

Dalam rangka itulah, Arab Saudi sejak kurun waktu 1970 berupaya keras menyebarkan ideologi Salafisme ke seluruh dunia. Diharapkan dengan semakin tersebarnya ajaran Salafisme, hal tersebut turut memperkuat legitimasi publik global terhadap sistem monarki yang dijalankan oleh Arab Saudi serta mendukung kepemimpinan Arab Saudi di dalam dunia Islam. Pecahnya *oil boom* di tahun 1970-an memberikan sokongan besar bagi Arab Saudi untuk menyebarkan ideologi salafi ini ke seluruh dunia. Selama kurun waktu dari akhir 1970-an hingga 1980-an, Raja Fahd tercatat telah menghabiskan anggaran lebih dari \$75 miliar untuk mendanai pendirian sekolah, gerakan dakwah salafi, dan pembangunan masjid di luar negeri (Bronson, 2006).

Dalam perkembangannya, Salafisme telah menciptakan karakter kontemporernya dengan terfragmentasinya ideologi tersebut menjadi beberapa faksi. Menariknya, faksi-faksi tersebut melakukan serangkaian aktivisme yang beragam dalam menyikapi berbagai kebijakan negara, dari yang cenderung apolitis hingga revolusioner dan militan. Bahkan tidak jarang pula, mereka memilih menggunakan cara-cara kekerasan dalam melawan rezim yang berkuasa (Krismono, 2017).

Indonesia merupakan salah satu target penyebaran ajaran dakwah salafi global oleh Arab Saudi ini. Noorhaidi Hasan dalam Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru (2008) menyebut bahwa sejumlah wacana akademik lama biasanya membedakan antara Wahabisme dan Salafisme. Apa yang disebut Salafisme muncul satu abad setelah pengaruh Abdul Wahhab di seluruh Jazirah Arab. Ia identik dengan para pemikir reformis modern yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1935), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Muhammad Rashid Rida (1865-1935). Ketiga pemikir ini menyerukan umat Islam untuk membuka pintu ijtihad, penyatuan Islam dan ilmu pengetahuan, yang gilirannya memberikan basis bagi modernisme dalam Islam. Pemikiran mereka adalah respons atas kolonialisme Barat, dan upaya rasional mereka agar Islam terlibat dalam politik membedakan dari Wahabisme.

Salah satu langkah strategis Arab Saudi dalam menyebarkan ajaran salafi di Indonesia adalah dengan membangun Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang didirikan tahun 1980. Pengelolaannya ditangani langsung oleh Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Kurikulum LIPIA merupakan duplikasi dari universitas pusatnya. Aliran dana dari Kerajaan Saudi

langsung diawasi oleh Kedutaan Saudi di Jakarta. LIPIA dipimpin direktur berkebangsaan Saudi, Khalid bin Muhammad Al-Deham. Para pengajar LIPIA direkrut dari Arab Saudi, Mesir, Yordania, Sudan, Somalia, dan Indonesia. Dari sana muncul istilah 'Pegawai Negeri Saudi' bagi orang Indonesia yang bekerja di LIPIA (Widhana, 2017).

Selain itu, Arab Saudi turut aktif mendanai para alumni Arab Saudi untuk menyebarkan ajaran salafi melalui berbagai media dakwah. Tidak hanya itu, berbagai sekolah dengan mengusung pemahaman Salafisme juga turut berdiri subur melalui sokongan Arab Saudi di Indonesia. Meskipun pada dasarnya bersifat apolitis, penyebaran dakwah salafi ini pada akhirnya juga berdampak positif terhadap citra dan legitimasi monarki Arab Saudi di Indonesia. Arab Saudi kerap dipandang sebagai *role model* yang ideal bagi sebagai sebuah negara Islam khususnya di kalangan para penganut salafi di Indonesia. Dalam konteks perkembangan media sosial yang pesat, Narasi Arab Saudi sebagai negara Islam ideal tersebut dengan sangat mudah ditemukan dalam materi dakwah yang disampaikan baik dalam kanal video, tulisan, ataupun lainnya. Dalam salah satu kanal berita contohnya terdapat sebuah tulisan dengan judul "Arab Saudi, Daulah Islam Pengibar Panji Tauhid Saat Ini" (Arab Saudi, Daulah Islam Pengibar Panji Tauhid Dan Sunnah Saat Ini, n.d.)

Jika citra positif terhadap monarki Arab Saudi cenderung bernada positif di tengah para penganut Salafisme di Indonesia, hal itu justru berbanding terbalik di tengah masyarakat Indonesia khususnya antara para penganut Aswaja dan di kalangan Islam moderat. Posisi gerakan Salafisme yang kerap menyerang praktik dan paham keagamaan aswaja pada akhirnya dinilai berdampak terhadap citra Arab Saudi sebagai negara pendukung gerakan salafi di Indonesia. Sentimen negatif terhadap konservatisme Arab Saudi dapat dilihat dari digunakannya istilah wahabi dalam melabeli Arab Saudi dan gerakan dakwah salafi lainnya.

Puncak dari gesekan tersebut dapat dilihat dari langkah NU sebagai representasi aswaja di Indonesia menyatakan bahwa gerakan salafi dianggap menjadi sumber bagi timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam salah satu rakorda, NU memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang paham wahabi di Indonesia (Imaduddin, 2022). Meskipun tidak secara langsung mengkaitkan wahabi dengan Arab Saudi, citra negatif terhadap Arab Saudi sebagai promotor salafi tidak dapat dihindarkan. Bahkan di kalangan NU, Saudi kerap dipersepsikan sebagai promotor paham radikalisme di Indonesia. Hal tersebut secara tegas disampaikan oleh ketua umum PBNU yang menyatakan bahwa keterkaitan Saudi dengan aliran dana radikal di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia umum. Dengan sifatnya yang diskursif, label radikalisme yang dilekatkan oleh NU terhadap Saudi tersebut pada dasarnya lebih mengarah kepada sisi ajaran salafi dalam menolak alkiturasi budaya melalui narasi bid'ah yang selama ini berkembang dalam tradisi keislaman di Indonesia (Kompas TV, 2020). Pada akhirnya, Arab Saudi dan Wahabi kerap dianggap menjadi dua sisi mata uang dalam satu koin. Dalam konteks yang lebih lanjut, citra kaku dan despotis yang melekat pada monarki Saudi semakin kuat dipersepsikan sebagai antitesa terhadap sistem demokrasi yang dianggap mampu menciptakan nilai-nilai Islam yang lebih humanis di Indonesia.

Tantangan Diplomasi Publik Arab Saudi

Langkah Arab Saudi dalam menjadikan Indonesia sebagai target dan objek dari diplomasi publik Arab Saudi melalui narasi moderasi Islam memiliki beberapa tantangan. Pertama, kuatnya potensi skeptisme yang muncul dari masyarakat Indonesia terhadap narasi moderasi Islam yang ditawarkan oleh Arab Saudi. Indonesia sebagai target diplomasi Arab Saudi memiliki pemikiran yang lebih kuat dan mengakar terhadap wacana moderasi Islam dibandingkan Arab Saudi itu sendiri. Sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia, narasi moderasi Islam bukanlah hal yang asing didiskusikan dalam wacana sosial politik Indonesia. Banyak cendekiawan ataupun pemikir dalam konteks individu maupun kelembagaan aktif dalam mewacanakan moderasi Islam. Hal itu tidak terlepas dari upaya mendukung harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan demokrasi sebagai sistem politik yang dianut.

Tantangan yang kedua adalah lemahnya legitimasi Arab Saudi sebagai promotor terhadap nilai moderasi Islam. Dengan menargetkan Indonesia sebagai objek diplomasi, Arab Saudi sejatinya harus berhadapan dengan mayoritas muslim Indonesia yang menganut paham aswaja. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, gerakan Salafisme yang semakin berkembang di Indonesia seringkali bergesekan dengan paham aswaja melalui narasi pemurnian Islam yang digaungkannya. Gesekan tersebut tentunya juga berdampak terhadap citra Arab Saudi yang dianggap sebagai penyokong gerakan dan dakwah salafi di Indonesia.

Tidak hanya itu, paham Salafisme yang didukung oleh Arab Saudi tersebut cenderung dianggap berseberangan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh narasi moderasi Islam. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan paham aswaja yang justru dinilai mempromosikan nilai-nilai moderasi Islam sebagai bagian dari sikap keagamaannya. Gesekan yang kerap kali terjadi antara paham aswaja dan Salafisme ini pada akhirnya mendorong organisasi yang berafiliasi terhadap paham aswaja semisal NU untuk melakukan gerakan perlawanan. Wacana “Islam Nusantara” sebagai salah satu bentuk bagian dari moderasi Islam yang kerap dikampanyekan oleh tokoh-tokoh NU pada dasarnya merupakan respon terhadap serangan gerakan Salafisme yang kerap kali mengkritik dan mendegradasi paham keagamaan yang dianut oleh Aswaja.

Tantangan yang ketiga adalah potensi melemahnya dukungan dari kelompok yang berafiliasi terhadap gerakan Salafisme di Indonesia. Kelompok masyarakat yang selama ini dekat dan menjadi bagian dari gerakan keagamaan salafi tentunya juga harus menjadi perhatian Arab Saudi dalam mengkampanyekan narasi moderasi Islam ini. Kelompok ini pada dasarnya telah menjadi bagian penting dari tonggak *soft power* Arab Saudi di Indonesia. Dalam perkembangannya, pembangunan institut pendidikan dan pemberian dana bantuan dalam mendukung gerakan Salafisme telah menjadi media yang efektif dari terbangunnya *soft power* Arab Saudi di Indonesia.

Meskipun berfokus pada penyebaran terhadap pemahaman agama, strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut secara tidak langsung juga memberikan keuntungan politik bagi Arab Saudi khususnya terhadap legitimasi publik muslim global terhadap sistem monarki yang dijalankan. Indonesia misalnya, semakin menguatnya paham Salafisme juga memperkuat ide Arab Saudi sebagai *role model* bagi negara Islam, khususnya di tengah para penganut salafi di Indonesia. Narasi moderasi Islam tentunya sedikit

kurangnya berdampak terhadap persepsi dan dukungan kelompok ini terhadap Arab Saudi yang selama ini dianggap sebagai patron dalam mendukung penyebaran paham salafi.


Banyak narasi dakwah salafi di Indonesia yang menyinggung Arab Saudi sebagai contoh yang ideal dalam mempraktekkan Islam dalam kehidupan bernegara dimana Hukum Syariat ditegakan dan diimplementasikan ke dalam hukum positif negara. Kekayaan dan kemakmuran ekonomi negara Arab Saudi acapkali dibingkai sebagai bentuk keberkahan dalam menerapkan Islam murni dan konservatif sekaligus sebagai antitesa terhadap sistem demokrasi liberal.


Simpulan

Diplomasi publik yang dilakukan Arab Saudi sebagai langkah besar untuk mewujudkan Visi 2030 terlihat sebagai optimisme besar dalam mengubah wajah Arab Saudi selama ini. Perubahan ini tentunya tidaklah mudah untuk dicapai. Citra yang telah lama terbentuk merupakan tantangan besar yang harus dihadapi. Citra Arab Saudi di Indonesia, lebih kental relasinya dengan paham salafisme dan wahabi. Pemahaman mengenai kondisi masyarakat Indonesia harus dipahami Arab Saudi sebagai bagian dari nilai yang perlu digunakan untuk merubah citranya.

Penggunaan alumni UIM adalah pilihan yang dapat memanfaatkan posisi mereka pada jabatan publik dan strategis saat ini untuk membawa identitas moderasi Islam sebagai modal utama Arab Saudi untuk merubah citranya. Seharusnya, Arab Saudi juga harus membangun komunikasi dan pemahaman yang selaras dengan nilai moderasi Islam yang selama ini dipahami oleh dominan masyarakat muslim Indonesia yang berlatar belakang *aswaja*.

ID ORCID

Fajar Imam Zakarsyi  <https://orcid.org/0009-0001-7719-5905>

Irmawan Effendi  <https://orcid.org/0009-0004-8253-116X>

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). The Articulation of Moderate Islam among Muslim Students A Case Study in State Islamic University of Malang. *International Symposium on Religious Literature and Heritage*, 363–373.
- Alexander, C. (2021). *The Frontiers of Public Diplomacy Hegemony, Morality and Power in the International Sphere*. Taylor & Francis.
- Alsedrah, I. (2021). Branding the Kingdom of Saudi Arabia. *Social and Management Research Journal (SMRJ)*, 18(1), 1–16.
- Andriasanti, L. (2014). Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 16(1), 84–101.
- Arab Saudi, Daulah Islam Pengibar Panji Tauhid dan Sunnah Saat Ini*. (n.d.). [Www.Asysyariah.Com](http://www.Asysyariah.Com).

- Atdikbud Riyadh. (2023). *Universitas Islam Madinah Mengadakan Forum Alumni Arab Saudi di Indonesia dan Asia Pasifik*. <https://atdikbud-riyadh.kemdikbud.go.id/wp/universitas-islam-madinah-mengadakan-forum-alumni-arab-saudi-di-indonesia-dan-asia-fasifik/>
- Athanasoulia, S. (2020). From ‘Soft’ to ‘Hard’ to ‘Moderate’: Islam in the Dilemmas of Post-2011 Saudi Foreign Policy. *Religions*, 11(4), 211. <https://doi.org/10.3390/rel11040211>
- Aulia, L. (2023). Arab Saudi dan Kanada Pulihkan Hubungan Diplomatik. *Www.Kompas.Id*.
- Bronson, R. (2006). *Thicker Than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia*. Oxford University Press.
- Cull, N. J. (2019). *Public Diplomacy Foundations for Global Engagement in the Digital Age*. Polity Press.
- Di Forum Alumni Universitas Arab Saudi se ASEAN dan Asia Pasifik, HNW: Islam Ajarkan Moderatisme, Cinta Negara, Bukan Radikalisme atau Terorisme. (2023). *Www.Mpr.Go.Id*.
- Ghaziani, M. A., & Ghaziani, M. A. (2022). A Reflection on the Human Rights Attitude and International Law Approaches of Iran and Saudi Arabia. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 16(3), 310–326. <https://doi.org/10.1080/25765949.2022.2128133>
- Helmy, M. I., Kubro, A. D. J., & Ali, M. (2021). The understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the hadiths on inter-religious relations in the Javanese pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 377–401.
- Imaduddin, A. H. (2022, November). 3 Fakta Paham Wahabi: Berkembang di Arab Saudi Ditolak oleh Lembaga Dakwah NU. *Www.Dunia.Tempo.Co*.
- Kompas TV. (2020). *Said Aqil: Isu Dana Radikalisme dari Arab Saudi Bukan Rahasia, Banyak Orang Tau*.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis : an introduction to its methodology*. SAGE.
- Krismono. (2017). Salafisme Di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, Dan Fragmentasi. *Millah*, XVI(2).
- Manor, I. (2013). *The Digitalization of Public Diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Nye, J. S. (2009). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. PublicAffairs.
- Palit, P. S. (2023). *New Media and Public Diplomacy*. Routledge.
- Putri, I. (n.d.). *HNW Sebut Islam Moderat Ajarkan Cinta Tanah Air*. News.Detik.Com. Retrieved April 7, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6508874/hnw-sebut-islam-moderat-ajarkan-cinta-tanah-air-bukan-radikalisme>
- Ramadhan, A. (2022). Terima Kunjungan Menteri Urusan Islam, Wapres Dukung Arab Saudi Pelopori Gerakan Islam Moderat. *Www.Nasional.Kompas.Com*.
- Samuel-Azran, T. (2020). *Nation Branding in the Arab World*. Routledge.
- Snow, N., & Cull, N. J. (2020). *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Routledge.
- Sukma, R. (2003). *Islam in Indonesian Foreign Policy*. Routledge Curzon.
- Vision 2030. (n.d.). *Www.Vision2030.Gov.Sa*.

Widhana, D. H. (2017). *LIPIA, Ajaran Wahabi di Indonesia*. Wwww.Tirto.Id.

Winarni, L., & Permana, A. P. Y. N. (2022). Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia. *Journal of Islamic World and Politics*, 6(1), 105–121.